

SALINAN
NOMOR 2/2020

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 44);
 37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);
 38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);
 39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
 40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17);
 41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 6);
 42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	:	Rp. 2.187.985.479.986,01
b. Belanja Daerah dan Transfer	:	<u>Rp. 1.909.775.302.319,19</u>
Surplus	:	Rp. 278.210.177.666,82
c. Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 489.359.571.730,35
Pengeluaran Pembiayaan	:	<u>Rp. 24.805.327.859,00</u>
Surplus	:	Rp. 464.554.243.871,35

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp 1.493.454.228,68 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Anggaran Pendapatan setelah perubahan | : | Rp. 2.189.478.934.214,69 |
| Realisasi Pendapatan | : | <u>Rp. 2.187.985.479.986,01</u> |
| Selisih | : | Rp. 1.493.454.228,68 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp. 744.915.896.587,52 (tujuh ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan	:	Rp. 2.654.691.198.906,71
Realisasi Belanja dan Transfer	:	<u>Rp. 1.909.775.302.319,19</u>
Selisih	:	Rp. 744.915.896.587,52
c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp. 743.422.442.358,84) (minus tujuh ratus empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:		
Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	:	(Rp. 465.212.264.692,02)
Realisasi	:	<u>Rp. 278.210.177.666,82</u>
Selisih	:	(Rp. 743.422.442.358,84)
d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 659.692.961,67 (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:		
Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp. 490.019.264.692,02
Realisasi Penerimaan Pembiayaan	:	<u>Rp. 489.359.571.730,35</u>
Selisih	:	Rp. 659.692.961,67
Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 1.672.141,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	:	Rp. 24.807.000.000,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	:	<u>Rp. 24.805.327.859,00</u>
Selisih	:	Rp. 1.672.141,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 658.020.820,67 (enam ratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:		
Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	:	Rp. 465.212.264.692,02

Realisasi Pembiayaan Netto	:	<u>Rp. 464.554.243.871,35</u>
Selisih	:	Rp. 658.020.820,67

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 742.764.421.538,17 (tujuh ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh belas sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	:	Rp. 489.523.033.616,78
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	:	<u>(Rp. 489.523.033.616,78)</u>
Sub Total	:	Rp. 0,00
c. Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	:	<u>Rp. 743.167.380.451,53</u>
Sub Total	:	Rp. 743.167.380.451,53
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	:	(Rp. 163.461.886,43)
e. Lain-lain	:	<u>(Rp. 239.497.026,93)</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	:	Rp. 742.764.421.538,17

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	:	Rp. 6.391.773.253.297,18
b. Jumlah Kewajiban	:	Rp. 12.096.894.513,23
c. Jumlah Ekuitas	:	Rp. 6.379.676.358.783,95

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 306.782.659.526,06 (tiga ratus enam milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	:	Rp. 2.265.250.180.310,79
b. Beban	:	<u>Rp. 1.958.095.614.002,73</u>
Surplus/Defisit Operasional	:	Rp. 307.154.566.308,06
c. Surplus/Defisit Non Operasional	:	(Rp. 228.385.717,00)
d. Beban Luar Biasa	:	<u>Rp. 143.521.065,00</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	:	Rp. 306.782.659.526,06

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 742.770.327.352,94 (tujuh ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Arus kas dari aktivitas Operasi	: Rp.	516.735.717.021,48
	Arus kas dari aktivitas Investasi Non Keuangan	: (Rp.	263.000.539.354,66)
	Arus kas dari aktivitas Pendanaan	: (Rp.	330.327.859,00)
	Arus kas dari aktivitas Transitoris	: Rp.	<u>0,00</u>
	Kenaikan Kas	: Rp.	253.404.849.807,82
b.	Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah, Kas Jaminan Kesehatan Nasional, dan Kas Bantuan Operasional Sekolah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	: Rp.	489.359.571.730,35
c.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah	: Rp.	732.518.691.596,23
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp.	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2019	: Rp.	2.602.752.860,30
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2019	: Rp.	3.116.184.497,50
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2019	: Rp.	4.526.792.584,14
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional non Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	: Rp.	3.830.600,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional non Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	: Rp.	<u>2.075.214,77</u>
	Saldo Akhir Kas	: Rp.	742.770.327.352,94

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 6.379.676.358.783,95 (enam trilyun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	: Rp. 6.382.648.910.352,52
b. Surplus/Defisit Laporan Operasional	: Rp. 306.782.659.526,06
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	:(Rp. <u>309.755.211.094,62</u>)
Ekuitas Akhir	: Rp. 6.379.676.358.783,95

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- c. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- g. Lampiran III : Laporan Operasional;
- h. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- i. Lampiran V : Neraca;
- j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- l. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- m. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- n. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- o. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- p. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- q. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- r. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP);
- s. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- t. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- u. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- v. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- w. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- x. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2020
WALIKOTA MALANG,

ttd.

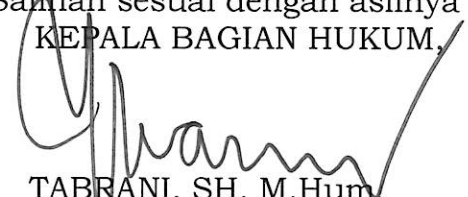
SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR : 136-2/2020

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Periode 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Bertambah / Berkurang	
			Rp.	%
1	2	3	4 = 2-3	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	(41.096.549.335,40)	91,80
Pendapatan Retribusi Daerah	45.187.533.200,00	46.605.703.263,00	1.418.170.063,00	103,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.585.915.478,00	28.559.431.165,39	5.973.515.687,39	126,45
Lain-lain PAD yang Sah	44.134.579.876,00	52.853.457.258,02	8.718.877.382,02	119,76
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	613.052.028.554,00	588.066.042.351,01	(24.985.986.202,99)	95,92
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	61.050.664.000,00	41.088.807.989,00	(19.961.856.011,00)	67,30
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	86.541.460.188,00	89.771.535.806,00	3.230.075.618,00	103,73
Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi khusus	214.254.716.962,60	185.881.891.526,00	(28.372.825.436,60)	86,76
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.248.350.502.150,60	1.203.245.896.321,00	(45.104.605.829,60)	96,39
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	0,00	100,00

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Bertambah / Berkurang	
			Rp.	%
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	182.924.766.510,09	252.268.704.314,00	69.343.937.803,91	137,91
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.458.359.000,00	3.458.359.000,00	0,00	100,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	186.383.125.510,09	255.727.063.314,00	69.343.937.803,91	137,21
Total Pendapatan Transfer	1.508.604.705.660,69	1.532.844.037.635,00	24.239.331.974,31	101,61
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	67.822.200.000,00	67.075.400.000,00	(746.800.000,00)	98,90
Pendapatan Dana Darurat	-	-	0,00	-
Pendapatan Lainnya	-	-	0,00	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	67.822.200.000,00	67.075.400.000,00	(746.800.000,00)	98,90
JUMLAH PENDAPATAN	2.189.478.934.214,69	2.187.985.479.986,01	(1.493.454.228,68)	99,93
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	865.923.220.800,09	791.508.273.117,88	74.414.947.682,21	91,41
Belanja Barang	902.470.580.979,91	775.898.397.761,65	126.572.183.218,26	85,97
Bunga	-	-	0,00	-
Subsidi	-	-	0,00	-
Hibah	109.225.515.490,00	101.823.026.287,00	7.402.489.203,00	93,22
Bantuan Sosial	1.515.000.000,00	-	0,00	-
Bantuan Keuangan	698.728.700,00	662.694.733,00	36.033.967,00	94,84
Jumlah Belanja Operasi	1.879.833.045.970,00	1.669.892.391.899,53	209.940.654.070,47	88,83
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	6.888.056.200,00	1.052.056.200,00	5.836.000.000,00	15,27
Belanja Peralatan dan Mesin	113.536.515.725,18	92.686.829.412,80	20.849.686.312,38	81,64
Belanja Gedung dan Bangunan	168.114.713.459,87	65.234.558.282,86	102.880.155.177,01	38,80
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.806.169.733,46	77.371.112.829,00	17.435.056.904,46	81,61
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.550.721.918,00	1.493.032.570,00	57.689.348,00	96,28
Belanja Aset Lainnya	1.027.121.784,00	687.950.060,00	339.171.724,00	66,98
Jumlah Belanja Modal	385.923.298.820,51	238.525.539.354,66	147.397.759.465,85	61,81

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Bertambah / Berkurang	
			Rp.	%
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	388.934.854.116,20	1.357.371.065,00	387.577.483.051,20	0,35
Jumlah Belanja Tak Terduga	388.934.854.116,20	1.357.371.065,00	387.577.483.051,20	0,35
JUMLAH BELANJA	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	744.915.896.587,52	71,94
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	-	-	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	-	-	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	0,00	-
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	-	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	744.915.896.587,52	71,94
SURPLUS/ (DEFISIT)	(465.212.264.692,02)	278.210.177.666,82	(743.422.442.358,84)	(59,80)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	659.692.961,67	99,87
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	0,00	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	0,00	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	0,00	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	0,00	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	0,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	0,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	0,00	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00	-
Jumlah Penerimaan	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	659.692.961,67	99,87

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Bertambah / Berkurang	
			Rp.	%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-			-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.475.000.000,00	24.475.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	332.000.000,00	330.327.859,00	1.672.141,00	99,50
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	0,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	0,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	0,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	0,00	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	0,00	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	0,00	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00	-
Jumlah Pengeluaran	24.807.000.000,00	24.805.327.859,00	1.672.141,00	99,99
PEMBIAYAAN NETTO	465.212.264.692,02	464.554.243.871,35	658.020.820,67	99,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	742.764.421.538,17	(742.764.421.538,17)	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



 TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Realisasi (Rp)							Bertambah / (Berkurang)	
Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Bagi	Bel Bantuan	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Belanja	Rp	%
22	23	24	25	26	27	28 (18+s.d+27)	29=28-17	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.955.624.599,12	231.690.312.958,00	15,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.296.325.574,10	8.730.793.931,42	1,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.302.271.473,10	7.725.568.032,42	1,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.992.950,00	22.507.050,00	2,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.251.634,00	75.688.366,00	5,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.708.231,00	5.291.769,00	0,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.400.850,00	11.899.150,00	1,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.659.905,00	26.040.095,00	2,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.667.795,00	74.212.205,00	7,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.496.200,00	93.303.800,00	8,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.432.950,00	132.827.050,00	12,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.001.326,00	33.038.674,00	3,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.972.080,00	95.647.920,00	8,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.025.110,00	11.874.890,00	1,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.314.950,00	3.525.050,00	0,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.375.080,00	11.504.920,00	1,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.621.550,00	278.450,00	0,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.671.950,00	10.128.050,00	0,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.327.100,00	34.492.900,00	3,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.830.000,00	40.750.000,00	3,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.405.500,00	2.354.500,00	0,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.319.500,00	16.360.500,00	1,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.079.800,00	45.160.200,00	4,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.458.975,00	69.061.025,00	6,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.631.200,00	40.488.800,00	5,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.727.500,00	31.812.500,00	3,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.840.311,00	25.959.689,00	2,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.588.031,00	68.831.969,00	8,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.875.100,00	1.164.900,00	0,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.378.523,00	21.021.477,00	4,28

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pembiayaan								
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)		Realisasi (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)				
		Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	%	Pengeluaran	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Urusan Penunjang Pemerintahan	490.019.264.692,02	24.807.000.000,00	489.523.033.616,78	24.805.327.859,00	496.231.075,24	0,10	1.672.141,00	0,01	
3.02	Keuangan	490.019.264.692,02	24.807.000.000,00	489.523.033.616,78	24.805.327.859,00	496.231.075,24	0,10	1.672.141,00	0,01	
3.02.0101	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku PPKD	490.019.264.692,02	24.807.000.000,00	489.523.033.616,78	24.805.327.859,00	496.231.075,24	0,10	1.672.141,00	0,01	


WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

PEMERINTAH KOTA MALANG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	2.189.478.934.214,69	2.187.985.479.986,01	1.493.454.228,68	99,93	
00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	613.052.028.554,00	588.066.042.351,01	24.985.986.202,99	95,92	
00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	41.096.549.335,40	91,80	
00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	45.187.533.200,00	46.605.703.263,00	(1.418.170.063,00)	103,14	
00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.585.915.478,00	28.559.431.165,39	(5.973.515.687,39)	126,45	
00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.134.579.876,00	52.853.457.258,02	(8.718.877.382,02)	119,76	
00 00 4 2	Dana Perimbangan	1.248.350.502.150,60	1.203.245.896.321,00	45.104.605.829,60	96,39	
00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	147.592.124.188,00	130.860.343.795,00	16.731.780.393,00	88,66	
00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	0,00	100,00	
00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	214.254.716.962,60	185.881.891.526,00	28.372.825.436,60	86,76	
00 00 4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	328.076.403.510,09	396.673.541.314,00	(68.597.137.803,91)	120,91	
00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	67.822.200.000,00	67.075.400.000,00	746.800.000,00	98,90	
00 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182.924.766.510,09	252.268.704.314,00	(69.343.937.803,91)	137,91	
00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	0,00	100,00	
00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.458.359.000,00	3.458.359.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.189.478.934.214,69	2.187.985.479.986,01	1.493.454.228,68	99,93	
00 00 5	BELANJA	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	744.915.896.587,52	71,94	
00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.318.204.242.116,29	851.778.932.165,88	466.425.309.950,41	64,62	
00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	846.410.442.100,09	776.048.486.767,88	70.361.955.332,21	91,69	
00 00 5 1 4	BELANJA HIBAH	80.645.217.200,00	73.710.379.600,00	6.934.837.600,00	91,40	
00 00 5 1 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.515.000.000,00	0,00	1.515.000.000,00	0,00	
00 00 5 1 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA/PARTAI POLITIK	698.728.700,00	662.694.733,00	36.033.967,00	94,84	
00 00 5 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	388.934.854.116,20	1.357.371.065,00	387.577.483.051,20	0,35	
00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	1.336.486.956.790,42	1.057.996.370.153,31	278.490.586.637,11	79,16	
00 00 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0,00	32.920.000,00	(32.920.000,00)	0,00	

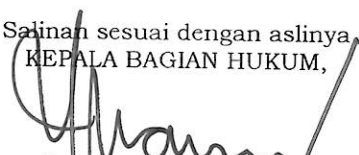
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
58 002 5 2	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan	233.580.000,00	203.304.600,00	30.275.400,00	87,04	
58 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	100,00	
58 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.580.000,00	92.920.000,00	22.660.000,00	80,39	
58 002 5 2 3	BELANJA MODAL	111.880.000,00	104.264.600,00	7.615.400,00	93,19	
	JUMLAH BELANJA	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	744.915.896.587,52	71,94	
	SURPLUS / DEFISIT	(465.212.264.692,02)	278.210.177.666,82	(743.422.442.358,84)	(59,80)	
00 00 6	PEMBIAYAAN DAERAH	465.212.264.692,02	464.554.243.871,35	658.020.820,67	99,86	
00 00 6 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	659.692.961,67	99,87	
00 00 6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	659.692.961,67	99,87	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	659.692.961,67	99,87	
00 00 6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24.807.000.000,00	24.805.327.859,00	1.672.141,00	99,99	
00 00 6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.475.000.000,00	24.475.000.000,00	0,00	100,00	
00 00 6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	332.000.000,00	330.327.859,00	1.672.141,00	99,50	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.807.000.000,00	24.805.327.859,00	1.672.141,00	99,99	
	PEMBIAYAAN NETTO	465.212.264.692,02	464.554.243.871,35	658.020.820,67	99,86	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH. M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

PEMERINTAH KOTA MALANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	Urusan Wajib	706.913.092.141,05	438.962.001.947,56	341.770.843.468,51	1.487.645.937.557,12	659.616.467.626,63	392.650.241.796,68	203.688.915.175,81	1.255.955.624.599,12	(231.690.312.958,00)	84,43
1 01	Pendidikan	392.181.043.776,92	105.124.309.968,00	53.721.765.760,60	551.027.119.505,52	388.127.837.488,00	104.691.503.857,50	49.476.984.228,60	542.296.325.574,10	(8.730.793.931,42)	98,42
1 01 01	Dinas Pendidikan	376.046.006.776,92	95.943.468.878,00	52.038.363.850,60	524.027.839.505,52	372.321.101.488,00	96.089.080.982,50	47.892.089.002,60	516.302.271.473,10	(7.725.568.032,42)	98,53
1 01 01	Belanja Tidak Langsung	335.063.447.581,92	0,00	0,00	335.063.447.581,92	338.115.651.238,00	58.117.784.700,50	8.338.838.987,00	404.572.274.925,50	69.508.827.343,58	120,74
1 01 01	Belanja Tidak Langsung	335.063.447.581,92	0,00	0,00	335.063.447.581,92	338.115.651.238,00	58.117.784.700,50	8.338.838.987,00	404.572.274.925,50	69.508.827.343,58	120,74
1 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73.856.050,00	5.160.618.200,00	433.400.835,00	5.667.875.085,00	54.014.600,00	4.703.682.829,00	419.209.500,00	5.176.906.929,00	(490.968.156,00)	91,34
1 01 01 01 00 1	Penyediaan jasa surat menyurat	5.330.000,00	75.247.250,00	152.331.350,00	232.908.600,00	5.330.000,00	64.293.750,00	148.099.000,00	217.722.750,00	(15.185.850,00)	93,48
1 01 01 01 00 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	388.800.000,00	0,00	388.800.000,00	0,00	353.115.893,00	0,00	353.115.893,00	(35.684.107,00)	90,82
1 01 01 01 00 4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	0,00	161.822.000,00	0,00	161.822.000,00	0,00	153.892.950,00	0,00	153.892.950,00	(7.929.050,00)	95,10
1 01 01 01 00 5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0,00	50.630.000,00	0,00	50.630.000,00	0,00	43.627.600,00	0,00	43.627.600,00	(7.002.400,00)	86,17
1 01 01 01 00 7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	244.187.100,00	0,00	244.187.100,00	(5.812.900,00)	97,67
1 01 01 01 00 8	Penyediaan alat tulis kantor	5.426.600,00	553.881.220,00	0,00	559.307.820,00	5.426.600,00	415.381.679,00	0,00	420.808.279,00	(138.499.541,00)	75,24
1 01 01 01 00 9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.360.000,00	113.512.500,00	0,00	117.872.500,00	4.360.000,00	96.825.000,00	0,00	101.185.000,00	(16.687.500,00)	85,84
1 01 01 01 01 0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.260.000,00	42.259.000,00	0,00	49.519.000,00	2.420.000,00	42.045.750,00	0,00	44.465.750,00	(5.053.250,00)	89,80
1 01 01 01 01 1	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	0,00	273.069.485,00	273.069.485,00	0,00	0,00	264.790.500,00	264.790.500,00	(8.278.985,00)	96,97

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ Berkurang	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
4 06 05 16 11 11 6	Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan Bakalankrajan	3.050.000,00	11.950.000,00	0,00	15.000.000,00	2.750.000,00	7.256.000,00	0,00	10.006.000,00	(4.994.000,00)	66,71
4 06 05 16 11 4	Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	1.800.000,00	98.200.000,00	0,00	100.000.000,00	502.500,00	53.612.800,00	0,00	54.115.300,00	(45.884.700,00)	54,12
4 06 05 16 11 23 2	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Bakalankrajan	5.450.000,00	6.550.000,00	0,00	12.000.000,00	2.052.500,00	4.297.000,00	0,00	6.349.500,00	(5.650.500,00)	52,91
4 06 05 16 11 0 29	Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan	2.600.000,00	17.400.000,00	0,00	20.000.000,00	150.000,00	14.390.300,00	0,00	14.540.300,00	(5.459.700,00)	72,70
4 06 05 16 11 8 34	Penyusunan Profil Kelurahan Bakalankrajan	10.490.000,00	2.010.000,00	0,00	12.500.000,00	7.840.000,00	1.007.400,00	0,00	8.847.400,00	(3.652.600,00)	70,78
4 06 05 16 11 5 40	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bakalankrajan	0,00	11.941.000,00	0,00	11.941.000,00	0,00	11.647.000,00	0,00	11.647.000,00	(294.000,00)	97,54
4 06 05 17 11	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	32.400.000,00	650.659.000,00	0,00	683.059.000,00	12.750.000,00	649.228.400,00	0,00	661.978.400,00	(21.080.600,00)	96,91
4 06 05 17 11 05 8	Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan Bakalankrajan	32.400.000,00	309.659.000,00	0,00	342.059.000,00	12.750.000,00	308.228.400,00	0,00	320.978.400,00	(21.080.600,00)	93,84
4 06 05 17 11 6 11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bakalankrajan	0,00	341.000.000,00	0,00	341.000.000,00	0,00	341.000.000,00	0,00	341.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	1.066.330.321.274,44	730.643.778.795,56	385.923.298.820,51	2.182.897.398.890,51	967.016.348.657,88	628.502.968.908,65	238.525.539.354,66	1.834.044.856.921,19	(348.852.541.969,32)	84,02

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I.4
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
 KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
01	Pelayanan Umum	1.081.581.110.440,99	578.037.540.133,24	503.543.570.307,75	53,44
01 1 07	Tenaga Kerja	7.922.220.917,26	6.741.742.461,00	1.180.478.456,26	85,10
01 1 16	Komunikasi dan Informatika	27.042.497.021,68	24.931.522.099,00	2.110.974.922,68	92,19
01 1 24	Kearsipan	432.880.000,00	387.179.409,00	45.700.591,00	89,44
01 3 01	Perencanaan	18.495.260.149,67	16.486.570.145,00	2.008.690.004,67	89,14
01 3 02	Keuangan	579.981.773.846,29	152.414.002.012,00	427.567.771.834,29	26,28
01 3 03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	19.605.681.472,22	18.487.174.477,00	1.118.506.995,22	94,29
01 3 04	Penelitian dan Pengembangan	3.445.000.000,00	3.070.064.428,00	374.935.572,00	89,12
01 4 01	Fungsi Penyusunan Kebijakan, Pengoordinasian Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, dan	119.633.414.844,16	108.165.583.715,24	11.467.831.128,92	90,41
01 4 02	Pengawasan	14.256.646.552,42	12.090.457.591,00	2.166.188.961,42	84,81
01 4 03	Pendukung DPRD	105.960.475.466,93	62.997.648.067,00	42.962.827.399,93	59,45
01 4 06	Pemerintahan Administrasi Kecamatan	184.805.260.170,36	172.265.595.729,00	12.539.664.441,36	93,21
02	Pertahanan	249.000.000,00	232.113.500,00	16.886.500,00	93,22
02 1 21	Persandian	249.000.000,00	232.113.500,00	16.886.500,00	93,22
03	Ketertiban dan ketentraman	44.613.623.592,31	38.790.947.756,00	5.822.675.836,31	86,95
03 1 05	Ketertiban, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33.745.831.844,77	29.675.840.910,00	4.069.990.934,77	87,94
03 4 04	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	10.867.791.747,54	9.115.106.846,00	1.752.684.901,54	83,87
04	Ekonomi	108.338.533.862,80	97.549.279.138,48	10.789.254.724,32	90,04
04 1 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.439.173.936,04	8.662.634.084,00	1.776.539.852,04	82,98
04 1 18	Penanaman Modal	12.141.679.284,22	10.865.886.378,38	1.275.792.905,84	89,49
04 1 20	Statistik	975.892.000,00	948.228.800,00	27.663.200,00	97,17
04 2 01	Kelautan dan Perikanan	934.269.300,00	905.080.500,00	29.188.800,00	96,88

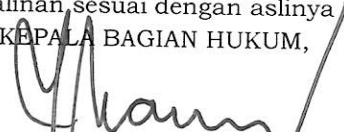
KODE	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
04 2 03	Pertanian	13.259.216.043,20	11.593.806.486,25	1.665.409.556,95	87,44
04 2 06	Perdagangan	57.903.612.228,57	52.558.023.271,94	5.345.588.956,63	90,77
04 2 07	Perindustrian	12.684.691.070,77	12.015.619.617,91	669.071.452,86	94,73
05	Lingkungan hidup	146.283.248.734,67	134.616.614.132,37	11.666.634.602,30	92,02
05 1 11	Lingkungan hidup	107.214.729.222,93	98.626.184.886,37	8.588.544.336,56	91,99
05 1 15	Perhubungan	39.068.519.511,74	35.990.429.246,00	3.078.090.265,74	92,12
06	Perumahan dan fasilitas umum	353.986.551.785,30	214.372.706.530,94	139.613.845.254,36	60,56
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	249.154.404.745,27	128.635.330.992,69	120.519.073.752,58	51,63
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	98.732.147.040,03	85.626.422.538,25	13.105.724.501,78	86,73
06 1 10	Pertanahan	6.100.000.000,00	110.953.000,00	5.989.047.000,00	1,82
07	Kesehatan	244.422.632.988,11	207.522.662.883,17	36.899.970.104,94	84,90
07 1 02	Kesehatan	237.405.033.988,11	202.157.035.659,17	35.247.998.328,94	85,15
07 1 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.017.599.000,00	5.365.627.224,00	1.651.971.776,00	76,46
08	Pariwisata dan budaya	11.884.638.908,98	10.762.169.239,73	1.122.469.669,25	90,56
08 1 22	Kebudayaan	2.445.720.000,00	2.247.099.577,73	198.620.422,27	91,88
08 2 02	Pariwisata	9.438.918.908,98	8.515.069.662,00	923.849.246,98	90,21
10	Pendidikan	587.982.868.730,38	566.809.275.862,55	21.173.592.867,83	96,40
10 1 01	Pendidikan	551.027.119.505,52	542.296.325.574,10	8.730.793.931,42	98,42
10 1 19	Kepemudaan dan Olah Raga	27.028.297.516,73	16.093.914.490,45	10.934.383.026,28	59,54
10 1 23	Perpustakaan	9.927.451.708,13	8.419.035.798,00	1.508.415.910,13	84,81
11	Perlindungan Sosial	75.348.989.863,17	61.081.993.142,71	14.266.996.720,46	81,07
11 1 06	Sosial	29.177.584.265,52	26.004.640.908,71	3.172.943.356,81	89,13
11 1 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.226.724.515,86	9.877.774.258,00	7.348.950.257,86	57,34
11 1 09	Pangan	1.092.828.400,00	909.193.457,00	183.634.943,00	83,20
11 1 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.617.151.533,31	14.306.802.382,00	1.310.349.151,31	91,61
11 4 05	Penanggulangan Bencana Daerah	12.234.701.148,48	9.983.582.137,00	2.251.119.011,48	81,60
	Jumlah	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	744.915.896.587,52	71,94

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	489.523.033.616,78	400.598.440.985,66
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(489.523.033.616,78)	(400.598.440.985,66)
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	743.167.380.451,53	489.523.033.616,78
Sub Total	743.167.380.451,53	489.523.033.616,78
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(163.461.886,43)	0,00
Lain-lain	(239.497.026,93)	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	742.764.421.538,17	489.523.033.616,78

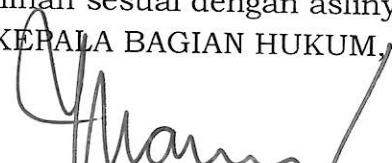
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


 TAERANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	470.184.607.665,06	453.452.629.252,09	16.731.978.412,97	3,69
Pendapatan Retribusi Daerah	46.920.433.833,00	51.773.976.224,44	(4.853.542.391,44)	(9,37)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.675.442.700,39	687.770.506,00	51.987.672.194,39	7.558,87
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	52.345.504.688,34	47.098.101.398,81	5.247.403.289,53	11,14
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	622.125.988.886,79	553.012.477.381,34	69.113.511.505,45	
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -				
Dana Bagi Hasil Pajak	41.907.655.640,00	59.220.052.598,00	(17.312.396.958,00)	(29,23)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	101.633.937.844,00	93.140.141.495,00	8.493.796.349,00	9,12
Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	844.477.164.310,00	42.026.496.690,00	4,98
Dana Alokasi Khusus	185.881.891.526,00	184.452.461.185,00	1.429.430.341,00	0,77
Jumlah Pendapatan Transfer	1.215.927.146.010,00	1.181.289.819.588,00	34.637.326.422,00	0,03
Dana Perimbangan				

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	73.871.078.000,00	25.500.000.000,00	48.371.078.000,00	189,69
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	73.871.078.000,00	25.500.000.000,00	48.371.078.000,00	189,69
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	252.268.704.314,00	167.347.677.930,00	84.921.026.384,00	50,75
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	3.458.359.000,00	3.337.330.000,00	121.029.000,00	3,63
Jumlah Pendapatan Provinsi	255.727.063.314,00	170.685.007.930,00	85.042.055.384,00	49,82
Jumlah Pendapatan Transfer	1.545.525.287.324,00	1.377.474.827.518,00	168.050.459.806,00	12,20
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah	97.598.904.100,00	73.398.666.268,55	24.200.237.831,45	32,97
Pendapatan Hibah Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	97.598.904.100,00	73.398.666.268,55	24.200.237.831,45	32,97
JUMLAH PENDAPATAN	2.265.250.180.310,79	2.003.885.971.167,89	261.364.209.142,90	13,04
BEBAN				
Beban Pegawai	790.674.240.820,59	762.391.902.609,37	28.282.338.211,22	3,71
Beban Persediaan	174.664.126.996,71	134.576.112.987,62	40.088.014.009,09	29,79
Beban Jasa	518.951.782.277,07	427.878.903.020,61	91.072.879.256,46	21,28
Beban Pemeliharaan	48.761.087.202,72	91.613.615.733,00	(42.852.528.530,28)	(46,78)
Beban Perjalanan Dinas	75.852.062.542,15	76.748.173.276,74	(896.110.734,59)	(1,17)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	73.710.379.600,00	300.595.470.636,27	(226.885.091.036,27)	(75,48)
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan	248.490.344.020,05	332.773.984.736,53	(84.283.640.716,48)	(25,33)
Beban Amortisasi	5.554.336.662,75	5.174.800.379,00	379.536.283,75	7,33
Beban Penyisihan Piutang	13.277.991.733,69	16.760.034.979,38	(3.482.043.245,69)	(20,78)
Beban Transfer	662.694.733,00	635.263.795,00	27.430.938,00	4,32
Beban Penghapusan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar di Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	7.496.567.414,00	5.304.963.516,69	2.191.603.897,31	41,31
Beban Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	1.958.095.614.002,73	2.154.453.225.670,21	(196.357.611.667,48)	(9,11)
Jumlah Surplus/Defisit Dari Operasi	307.154.566.308,06	(150.567.254.502,32)	457.721.820.810,38	(304,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON				
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL - LO				
Defisit Non Operasional	228.385.717,00	115.210.885.966,00	(114.982.500.249,00)	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional	228.385.717,00	115.210.885.966,00	(114.982.500.249,00)	0,00
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(228.385.717,00)	(115.210.885.966,00)	114.982.500.249,00	0,00
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	143.521.065,00	34.080.542,00	109.440.523,00	321,12
Jumlah Beban Luar Biasa	143.521.065,00	34.080.542,00	109.440.523,00	321,12
Pos Luar Biasa	143.521.065,00	34.080.542,00	109.440.523,00	321,12
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	306.782.659.526,06	(265.812.221.010,32)	572.594.880.536,38	(215,41)

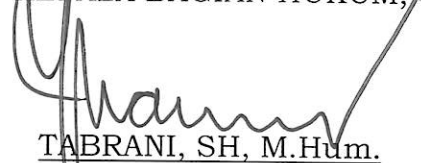
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

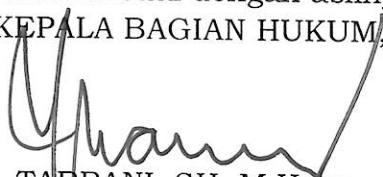
URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
EKUITAS AWAL	6.382.648.910.352,52	6.203.976.506.417,60
SURPLUS/DEFISIT-LO	306.782.659.526,06	(265.812.221.010,32)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(309.755.211.094,62)	444.484.624.945,24
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi ekuitas lainnya	(309.755.211.094,62)	444.484.624.945,24
EKUITAS AKHIR	6.379.676.358.783,95	6.382.648.910.352,52

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NERACA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	732.518.691.596,23	484.167.785.594,53
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara FKTP	2.606.583.460,30	2.693.638.550,82
Kas di Bendahara Dana BOS	3.118.259.712,27	3.157.840.546,67
Kas di Bendahara BLUD	4.526.792.584,14	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
Piutang Pajak Daerah	234.109.824.236,26	220.829.820.451,02
Piutang Retribusi Daerah	11.550.653.250,88	10.899.996.919,88
Piutang Dana Bagi Hasil	12.681.249.689,00	-
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-
Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-
Penyisihan Piutang	-	-
Beban Dibayar Dimuka	(165.290.633.273,42)	(152.012.641.539,73)
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	694.628.866,39	378.044.309,48
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Piutang Pendapatan Lainnya	-	-
Piutang Lainnya	-	-
	4.060.156.713,50	4.161.625.116,76

(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar	19.853.055.436,49	23.720.046.264,08
INVESTASI JANGKA PANJANG	860.429.262.272,04	597.996.156.213,51
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Jangka Panjang	-	-
Investasi Dalam Surat Utang Negara	-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-
Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	374.508.909.229,00	326.146.283.411,00
Investasi Permanen Lainnya	-	-
Jumlah Investasi Permanen	374.508.909.229,00	326.146.283.411,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	374.508.909.229,00	326.146.283.411,00
ASET TETAP		
Tanah	2.646.600.381.267,00	2.660.808.950.981,00
Peralatan dan Mesin	852.192.730.277,51	767.267.896.794,71
Gedung dan Bangunan	1.293.138.813.847,05	1.217.954.244.534,74
Jalan, Irigasi dan, Jaringan	1.991.556.907.021,28	2.936.534.806.454,27
Aset Tetap Lainnya	65.588.044.383,01	62.189.152.930,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.635.869.400,00	34.463.337.400,00
Akumulasi Penyusutan	(1.877.161.874.051,66)	(2.359.198.132.227,44)
Jumlah Aset Tetap	5.004.550.872.144,19	5.320.020.256.867,29
DANA CADANGAN		
Dana cadangan	-	-
Jumlah Dana Cadangan	-	-
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	50.105.000,00	52.105.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00
Aset Tak Berwujud	8.449.293.987,50	8.730.276.765,25
Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya	483.999.255,50	318.494.746,46
Aset Lain-lain	36.851.493.408,95	36.851.493.408,95
Jumlah Aset Lainnya	152.284.209.651,95	152.401.687.920,66
JUMLAH ASET	6.391.773.253.297,18	6.396.564.384.412,46

(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	851.525.261,12	924.148.419,70
Utang Belanja	9.679.341.348,85	12.672.320.630,78
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.566.027.903,26	510.263,00
Utang Pihak Ketiga Lainnya	-	318.494.746,46
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12.096.894.513,23	13.915.474.059,94
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Premium (Diskonto) Obligasi	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	12.096.894.513,23	13.915.474.059,94
EKUITAS DANA		
EKUITAS		
Ekuitas	6.379.676.358.783,95	6.382.648.910.352,52
JUMLAH EKUITAS	6.379.676.358.783,95	6.382.648.910.352,52
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.391.773.253.297,18	6.396.564.384.412,46

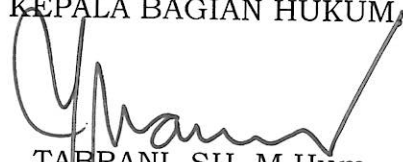
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk :		
Penerimaan Pajak Daerah	460.047.450.664,60	434.678.309.679,54
Penerimaan Retribusi Daerah	46.605.703.263,00	50.505.712.055,51
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.559.431.165,39	24.792.410.715,90
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	52.853.457.258,02	46.911.950.692,72
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	41.088.807.989,00	59.220.052.598,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	89.771.535.806,00	93.140.141.495,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	844.477.164.310,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	185.881.891.526,00	184.452.461.185,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	73.871.078.000,00	25.500.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	252.268.704.314,00	204.361.428.175,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Lainnya	3.458.359.000,00	3.337.330.000,00
Penerimaan Hibah	67.075.400.000,00	68.817.280.000,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	2.187.985.479.986,01	2.040.194.240.906,67
Arus Kas Keluar :		
Pembayaran Pegawai	791.508.273.117,88	761.211.732.403,01
Pembayaran Barang dan Jasa	804.011.044.448,65	739.047.320.898,41
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	73.710.379.600,00	72.938.985.333,27
Pembayaran Bantuan Sosial	-	-

Uraian	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pembayaran Bantuan Keuangan	662.694.733,00	635.263.795,00
Pembayaran Tak Terduga	1.357.371.065,00	34.080.542,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.671.249.762.964,53	1.573.867.382.971,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	516.735.717.021,48	466.326.857.934,98
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
Arus Masuk Kas :		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Keluar Kas :		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	1.052.056.200,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	92.686.829.412,80	164.899.809.894,08
Perolehan Gedung dan Bangunan	65.234.558.282,86	84.752.382.348,97
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	77.371.112.829,00	94.992.003.183,81
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.493.032.570,00	4.706.001.970,00
Perolehan Aset Lainnya	687.950.060,00	1.853.071.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.475.000.000,00	26.198.996.407,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	263.000.539.354,66	377.402.265.303,86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(263.000.539.354,66)	(377.402.265.303,86)

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas :		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Keluar Kas :		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	330.327.859,00	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	330.327.859,00	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(330.327.859,00)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas :		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Penerimaan Sisa UP tahun lalu		
Jumlah Arus Kas Masuk	33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Arus Keluar Kas :		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Jumlah Arus Kas Keluar	33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan Kas	253.404.849.807,82	88.924.592.631,12
Saldo Awal Kas di BUD, Kas Bend. Penerimaan JKN, Kas di Bend. BOS		
Saldo Awal Kas di BUD, Kas JKN, dan Kas BOS SILPA	489.359.571.730,35	400.598.440.985,66

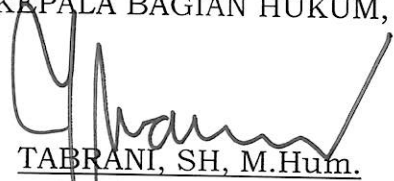
Uraian	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo Akhir Kas di BUD	732.518.691.596,23	484.167.785.594,53
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA 2019	2.602.752.860,30	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA 2018	-	2.661.457.950,82
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2019	3.116.184.497,50	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2018	-	2.576.262.795,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2017	-	117.527.276,43
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD 2019	4.526.792.584,14	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan JKN non SILPA	3.830.600,00	32.180.600,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS non SILPA	2.075.214,77	464.050.475,24
<i>Saldo Akhir Kas</i>	742.770.327.352,94	490.019.264.692,02

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Malang secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.
4. Sesuai Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/1/35.73.112/2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Malang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang berpengaruh terhadap penambahan jumlah entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan tersebut.

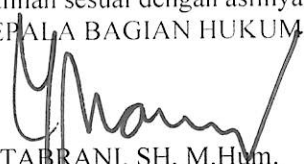
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada tahun-tahun berikutnya.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH


NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		TGL. 1-1-2019	2019	2019	TGL. 31-12-2019
1	2	3	4	5	6
1	PIUTANG PAJAK	223.972.667.235,80	46.357.742.017,83	36.220.585.017,37	234.109.824.236,26
2	PIUTANG RETRIBUSI	11.332.736.763,88	4.270.327.700,00	4.052.411.213,00	11.550.653.250,88
3	PIUTANG DANA BAGI HASIL	-	12.681.249.689,00	-	12.681.249.689,00
4	PIUTANG LAINNYA	4.161.625.116,76	1.663.737.225,63	1.765.205.628,89	4.060.156.713,50
JUMLAH		239.467.029.116,44	64.973.056.632,46	42.038.201.859,26	262.401.883.889,64

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

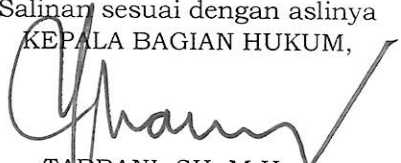
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

NO	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL TGL. 1-1-2019	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2019
1	2	3	4	5	6
1	PIUTANG PAJAK	145.730.402.757,62	11.991.988.289,84	-	157.722.391.047,46
2	PIUTANG RETRIBUSI	4.896.942.824,24	875.332.763,22	-	5.772.275.587,46
3	PIUTANG DANA BAGI HASIL	-	-	-	-
4	PIUTANG LAINNYA	1.385.295.957,87	410.670.680,63	-	1.795.966.638,50
JUMLAH		152.012.641.539,73	13.277.991.733,69	-	165.290.633.273,42

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650302 199003 1 019

DAFTAR PENYERTAAN MODAL

NO	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah (Penyertaan Modal Daerah)	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun
1	2	3	4	5	6	7
1	2019	PDAM	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Permanen	584.521.462.484,06	239.438.458.891,00
2	2019	PD. BPR	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Permanen	50.000.000.000,00	9.700.000.000,00
3	2019	PD. RUMAH POTONG HEWAN	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Permanen	28.881.876.008,00	8.015.076.008,00
4	2019	BANK JATIM	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Permanen	27.158.999.750,00	27.158.999.750,00
JUMLAH					690.562.338.242,06	284.312.534.649,00

Keterangan :

Jumlah Penyertaan Modal dalam Lampiran XI merupakan penyertaan modal tunai Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam nilai penyertaan modal dalam Laporan Keuangan BUMD dan jumlahnya tidak sama dengan jumlah ekuitas BUMD yang sudah memperhitungkan penambahan modal dari hibah, dana cadangan, dan saldo laba tahun berjalan.

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

(INVESTASI) DAERAH

Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
21.475.000.000,00	260.913.458.891,00	323.608.003.593,06	-	-	260.913.458.891,00
1.500.000.000,00	11.200.000.000,00	38.800.000.000,00	-	-	11.200.000.000,00
1.500.000.000,00	9.515.076.008,00	19.366.800.000,00	-	-	9.515.076.008,00
-	27.158.999.750,00	-	4.954.887.914,39	-	27.158.999.750,00
24.475.000.000,00	308.787.534.649,00	381.774.803.593,06	4.954.887.914,39	-	308.787.534.649,00

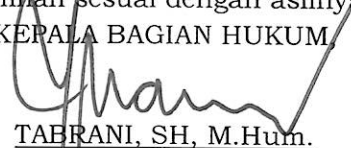
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,


 TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

NO	JENIS INVESTASI	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2019	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2019
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAH	-	2.660.808.950.981,00	140.873.424.200,00	155.081.993.914,00	2.646.600.381.267,00
2	PERALATAN DAN MESIN	-	767.267.896.794,71	99.232.628.015,80	14.307.794.533,00	852.192.730.277,51
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	1.217.954.244.534,74	79.054.483.043,86	3.869.913.731,55	1.293.138.813.847,05
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	2.936.534.806.454,27	81.267.460.249,00	1.026.245.359.681,99	1.991.556.907.021,28
5	ASET TETAP LAINNYA	-	62.189.152.930,01	3.426.007.403,00	27.115.950,00	65.588.044.383,01
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	34.463.337.400,00	317.732.000,00	2.145.200.000,00	32.635.869.400,00
JUMLAH			7.679.218.389.094,73	404.171.734.911,66	1.201.677.377.810,54	6.881.712.746.195,85

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

NO	JENIS INVESTASI	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH ASET TETAP PER 31-12-2019
1	2	3	4
1	TANAH	-	2.646.600.381.267,00
2	PERALATAN DAN MESIN	-	852.192.730.277,51
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	1.293.138.813.847,05
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	1.991.556.907.021,28
5	ASET TETAP LAINNYA	-	65.588.044.383,01
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	32.635.869.400,00
JUMLAH			6.881.712.746.195,85

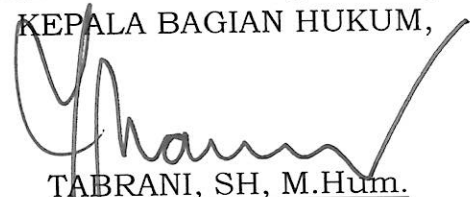
WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH KONS. DALAM Pengerjaan PER 31-12-2019	SKPD
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Garasi Bis Sekola Jl. Arumba 06 RT.01 RW.01 Tunggulwulung	2019	81.432.000,00	Dinas Pendidikan
2	Perencanaan Gedung Baru SMP(Kajian Penentuan Lokasi)	2019	31.580.000,00	Dinas Pendidikan
3	Perencanaan Gedung Baru SMP(Kajian Penentuan Lokasi)	2019	31.580.000,00	Dinas Pendidikan
4	Perencanaan Gedung Baru SMP(Kajian Penentuan Lokasi)	2019	31.580.000,00	Dinas Pendidikan
5	Perencanaan /DED pembuatan ruang perawatan penyakit akibat rokok di RSUD	2013	147.110.000,00	Dinas Kesehatan
6	Pembangunan Jembatan Kedungkandang	2012	5.214.458.000,00	DPUPR
7	Pembangunan Jembatan Kedungkandang	2012	1.081.933.400,00	DPUPR
8	Pembangunan Drainase Jl Bondowoso - Kali Metro	2013	24.073.625.000,00	DPUPR
9	Perencanaan Teknis Penyusunan DED Rumah Dinas PMK Kota Malang	2014	49.900.000,00	DPUPR
10	Pembangunan Jembatan Kedungkandang	2014	49.775.000,00	DPUPR
11	Pembangunan Jembatan Jl. KH. Malik Dalam RT 02 RW 04 Kel. Buring	2014	15.280.000,00	DPUPR
12	Peningkatan Jembatan Lowokdoro Bumiayu	2014	85.277.000,00	DPUPR
13	Peningkatan Jl. Willis Kel. Gadingkasri	2014	10.560.000,00	DPUPR
14	Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih RT. 05 RW. 01 Kel. Balarjosari	2014	9.072.000,00	DPUPR
15	Pelebaran jalan dan jembatan Jl. RW 14 dan RW 15 Kel. Bunulrejo	2014	15.730.000,00	DPUPR
16	Perencanaan Teknis Peningkatan Jl. Memberamo - Jl. Warinoy - Jl. Simp. Sulfat Selatan (DAK)	2016	31.700.000,00	DPUPR
17	Perencanaan Teknis Pengaspalan jalan hotmix RW.06 jl. Tmn Agung puncak jaya ujung, krakatau. Puncak	2016	40.580.000,00	DPUPR
18	Perencanaan Teknis Pembuatan Saluran Drainase baru gang 5 rW 05 Kel.Madyopuro	2016	11.985.000,00	DPUPR
19	Pembangunan Sarana & Prasarana Air Minum RW.02 Kelurahan Bandungrejosari Kec. Sukun	2017	44.100.000,00	DPUPR

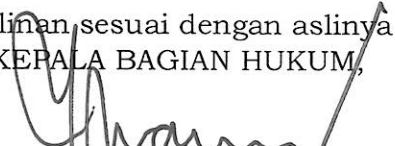
NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH KONS. DALAM Pengerjaan per 31-12-2019	SKPD
1	2	3	4	5
20	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi / Pengembangan Jalan RT.06 RW.06 Kel. Dinoyo	2017	6.350.000,00	DPUPR
21	Perencanaan Pembangunan Islamic Center	2017	745.800.000,00	DPUPR
22	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Mayjen Sungkono Gg VI RT.	2017	12.770.000,00	DPUPR
23	Jasa Konsultansi Perencanaan Air Minum RW 01 Sukun	2017	47.600.000,00	DPUPR
24	Jasa Konsultansi Perencanaan Air Minum RW I/II Jl. LA. Adi Sucipto	2017	47.600.000,00	DPUPR
25	Jasa Konsultansi Perencanaan Air Minum RW 15 Kel Purwantoro	2017	47.600.000,00	DPUPR
26	Perencanaan pemeliharaan Jl. Karya Timur RT.02 RW. VI Kel. Purwantoro	2018	18.913.000,00	DPUPR
27	Perencanaan pemeliharaan Jl. HAMID RUSDI III RT.06 KEL. BUNULREJO	2018	7.200.000,00	DPUPR
28	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan	2018	36.741.000,00	DPUPR
29	Pembangunan Gedung Bersama di Balaikota (Review DED), Tahun 2019	2019	99.660.000,00	DPUPR
30	JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNIT PILAH KOMPOS DAUR ULANG KELURAHAN BANDUNGREJOSARI	2018	27.885.000,00	DLH
31	JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEKNIS PERBAIKAN RUMAH PKD BALEARJOSARI	2018	15.450.000,00	DLH
32	JASA PERENCANAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN UNIT PKD KEL. TLOGOWARU	2018	28.215.000,00	DLH
33	Pengadaan Ruang Atas	2019	27.000.000,00	Dispora
34	DED/Perencanaan pembangunan gedung perkantoran BPKAD Kota	2016	367.928.000,00	BPKAD
35	Perencana teknis pengadaan konstruksi/pembelian bangunan Jl. A. Yani No.98 Kelurahan Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang	2019	4.400.000,00	Bakesbangpol
36	Pengadaan Ruang Atas Jl. Arumba 06 RT.01 RW.01 Tunggulwulung	2019	37.500.000,00	Kelurahan Tunggulwulung
	JUMLAH		32.635.869.400,00	

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2019	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2019
1	2	3	4	5	6	7
1	TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	-	-	-	-	-
2	TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	-	52.105.000,00	-	2.000.000,00	50.105.000,00
3	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	106.449.318.000,00	-	-	106.449.318.000,00
4	ASET TAK BERWUJUD	-	34.959.586.952,00	5.285.845.760,00	-	40.245.432.712,00
5	ASET LAIN YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	-	318.494.746,46	165.504.509,04	-	483.999.255,50
6	ASET LAIN LAIN	-	72.994.557.200,52	-	-	72.994.557.200,52
JUMLAH			214.774.061.898,98	5.451.350.269,04	2.000.000,00	220.223.412.168,02

Keterangan:

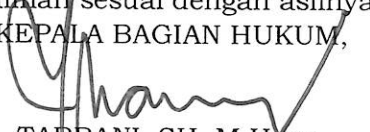
1. Aset Tak Berwujud disajikan berbeda dengan neraca sebesar Rp8.449.293.987,50 karena di neraca disajikan sebesar nilai buku yaitu sesudah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp31.796.138.724,50
2. Aset Lain-lain disajikan berbeda dengan neraca sebesar Rp36.851.493.408,95 karena di neraca disajikan sebesar nilai buku yaitu sesudah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp36.143.063.791,57.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

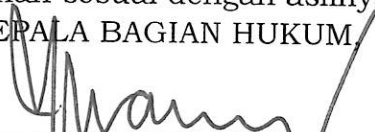
NO	URAIAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2019	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2019
1	2	3	4	5	6
1	Kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yg disetor ke kas bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah	510.263,00	-	-	510.263,00
2	Kas Bendahara Jaminan Bongkar	318.494.746,46	165.504.509,04	-	483.999.255,50
3	Hutang klaim jaminan kesehatan ke RSUD pada Dinas Kesehatan	-	55.955.400,00	-	55.955.400,00
4	Hutang Jangka Pendek klaim Jaminan Kesehatan kepada RSSA, RST, RSI Aisiyah, RS Lavalette, RSUB Malang pada Dinas Kesehatan	-	1.025.562.984,76	-	1.025.562.984,76
JUMLAH		319.005.009,46	1.247.022.893,80	-	1.566.027.903,26

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM.


 TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

NO	URAIAN	SALDO AWAL TGL. 1-1-2019	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019	SALDO AKHIR TGL. 31-12-2019
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			
	JUMLAH				

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


 TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH REALISASI			JUMLAH AKUMULASI REALISASI S.D AKHIR TAHUN n	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN n-2	REALISASI TAHUN n-1	REALISASI TAHUN n		
1	2	3	4	5	6	7	8
			N	H	I		
			L				
JUMLAH			-	-	-	-	-

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

IKHTISAR LAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/
 PERUSAHAAN DAERAH

I. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER 2019

Aset		
Aset Lancar	Rp 168.517.160.431,00	
Aset Tidak Lancar	Rp 196.565.548.947,00	
Aset Dalam Pelaksanaan	Rp -	
TOTAL Aset		<u>Rp 365.082.709.378,00</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 23.581.968.261,00	
Kewajiban Jangka Panjang	Rp 17.847.046.707,00	
Ekuitas (Modal)	Rp 323.653.694.410,00	
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp 365.082.709.378,00

LAPORAN PERHITUNGAN LABA/RUGI TAHUN 2019

PENDAPATAN USAHA		Rp213.619.630.785,00
BEBAN USAHA		<u>-Rp153.585.488.132,00</u>
LABA USAHA		Rp60.034.142.653,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN/BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Lain-lain	Rp2.995.123.683,00	
Beban Lain-lain	<u>-Rp447.299.470,00</u>	
Jumlah Pendapatan Lain-lain/Beban Non Operasional		<u>Rp2.547.824.213,00</u>
LABA USAHA SEBELUM PAJAK		Rp62.581.966.866,00
Pajak Penghasilan		-Rp11.468.517.315,00
Cadangan Dana Tujuan		<u>Rp0,00</u>
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		<u><u>Rp51.133.449.551,00</u></u>

LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2019

	2019
PENERIMAAN :	
Jumlah Pendapatan Biaya Potong Hewan	1.392.842.500
Jumlah Pendapatan Biaya Penitipan	421.411.330
Jumlah Pendapatan Budidaya Hewan Potong	639.519.700
Jumlah Pendapatan Diluar Usaha	2.007.180.895
Jumlah Penerimaan	4.460.954.425
PENGELUARAN :	
Jumlah Beban Bagian Pemotongan Hewan	366.841.075
Jumlah Beban Bagian Bdhp	184.224.439
Jumlah Beban Bagian Administrasi Umum	1.042.481.919
Jumlah Beban Bagian Satuan Pengawasan Intern (Spi)	21.569.600
Jumlah Pengeluaran Non- Operasional	1.615.117.033
Jumlah Pengeluaran Non-Operasional	2.030.953.185
Jumlah Pengeluaran	3.646.070.218
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	814.884.208
SALDO AWAL	2.346.885.936
SALDO AKHIR	3.161.770.144

IV. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.

Posisi saham Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 adalah 108.635.999 lembar dengan jumlah nominal sebesar Rp27.158.999.750,00.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019